

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada era ini, perkembangan perekonomian dan teknologi semakin meningkat. Perkembangan ini mengakibatkan keberadaan dan peran profesi auditor semakin dibutuhkan. Laporan keuangan perlu dilakukan audit untuk mewujudkan laporan keuangan yang reliabel dan relevan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.

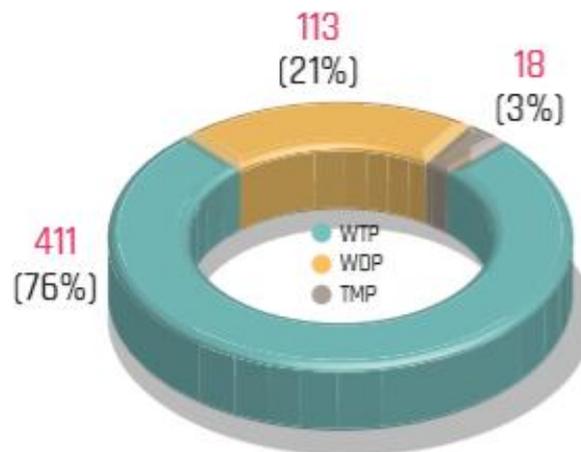
Namun suatu hal yang sangat disayangkan adalah seiring dengan meningkatnya perekonomian, kecurangan atas laporan keuangan juga meningkat. Kecurangan atas laporan keuangan pada instansi pemerintah Indonesia tidak hanya terjadi di kalangan pemerintah pusat melainkan juga terjadi di pemerintah daerah. Seringkali modus kecurangan yang dilakukan adalah manipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark up* harga dalam pengadaan barang yang dapat merugikan keuangan negara (Chandra dan Ikhsan 2015).

Kecurangan ini diperkuat dengan data pada tahun 2017 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu *Transparency International* dalam situsnya www.transparency.org, bahwa Indonesia menempati ranking 96 dari 180 negara dengan skor 37 dari skor tertinggi yaitu 100. Data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong negara dengan tingkat korupsi yang

cukup tinggi. (<https://www.transparency.org/country/IDN> diakses 3 November 2018)

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemerintahan daerah IHPS I Tahun 2018 memuat hasil pemeriksaan atas 542 (100%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2017 yang wajib diserahkan, BPK memberikan 411 opini WTP (76%), 113 opini WDP (21%), dan 18 opini TMP (3%), seperti yang disajikan pada *Gambar 1.1*

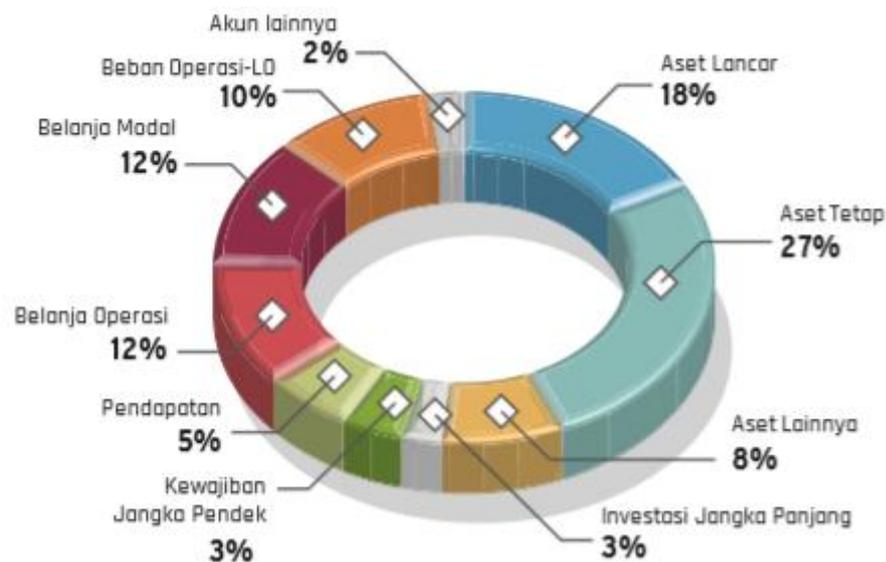
Gambar 1.1 Grafik Opini LKPD Tahun 2017



Sumber : IHPS BPK Semester I 2017

Atas 113 LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang cukup dapat dilihat pada *Gambar 1.2*

Gambar 1.2 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP dan/atau Tidak Didukung dengan Bukti yang Cukup pada LKPD Tahun 2017



Sumber : IHPS BPK Semester I 2017

Peran auditor sangat dibutuhkan instansi pemerintahan untuk melakukan audit atas laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintahan menjadi pertanggungjawaban atas dana yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Auditor mempunyai peran untuk melakukan pengawasan guna menjamin pendistribusian dana merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Auditor internal merupakan bagian dari pengendalian internal yang berfungsi untuk membantu mencegah dan mendeteksi kecurangan yang mungkin dapat terjadi. Pada pemerintahan daerah, pengendalian internal dan pengawasan atas laporan keuangan dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah merupakan salah satu Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) yang mempunyai fungsi perencanaan program pengawasan, perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, pemeriksaan serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengawasan. Inspektorat daerah mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan perangkat daerah.

Hilmi (2011) menyebutkan pengalaman kerja dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja auditor. Apabila auditor semakin banyak melakukan pekerjaan dalam bidang pemeriksaan, maka auditor tersebut akan semakin terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) juga mendapatkan hasil bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif pada pendeteksiian kecurangan, hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Indira dan Wiratmaja (2016) yang menyatakan bahwa pengalaman auditor berpengaruh positif pada pendeteksiian kecurangan, yang berarti semakin tinggi pengalaman auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kecurangan cenderung semakin tinggi.

Selain pengalaman kerja, sikap lain yang harus dimiliki seorang auditor yaitu skeptisisme profesional. Dengan sikap tersebut, seorang auditor tidak akan begitu saja menaruh kepercayaan terhadap penjelasan klien yang berhubungan dengan bukti audit dan mampu melaporkan adanya tindakan

kecurangan sehingga seorang auditor dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Penelitian dari Beasley *et. al* pada Noviyanti (2008) menyimpulkan dari kasus kecurangan dalam laporan keuangan, 24 kasus (60%) diantaranya terjadi karena auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional yang memadai dan ini merupakan urutan ketiga dari audit defisiensi yang paling terjadi. Penelitian Supriyanto (2014) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa skeptisisme profesional akan mengarahkan untuk menanyakan setiap bukti dan isyarat yang menunjukkan kemungkinan terjadinya kecurangan dan mampu meningkatkan auditor dalam mendeteksi setiap gejala yang timbul.

Hasil penelitian tersebut diperkuat dengan penelitian dari Hartan (2016) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan. Sehingga semakin tinggi skeptisisme yang dimiliki oleh seorang auditor, maka kemungkinan terjadinya kecurangan juga semakin kecil.

Selain menerapkan sikap skeptisisme profesional, auditor juga dituntut untuk mempunyai sikap independensi. Mulyadi dalam Sanjaya (2017) menyatakan sikap independensi sangat dibutuhkan oleh seorang auditor dalam menjalankan tugasnya. Jika auditor memiliki sikap independensi maka auditor akan selalu berpikir secara objektif, jujur dan selalu bertindak adil. Auditor dituntut untuk selalu menjaga sikap independensinya pada saat melakukan

proses audit, hal ini dilakukan untuk membangun kepercayaan terhadap klien juga untuk mempertahankan sikap profesional sebagai seorang auditor.

Dalam penelitiannya, Hartan (2015) menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Sehingga semakin tinggi independensi yang dimiliki auditor maka semakin meningkat pula kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Kompetensi seorang auditor juga dibutuhkan dalam menjalankan tugasnya. Hartan (2016) mengemukakan bahwa melalui kompetensi yang baik, auditor dapat melaksanakan proses audit dengan lebih efektif dan efisien, serta auditor dapat mengasah *sensitivitas* (kepekaan) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Marcellina dan Sugeng (2009) menyatakan bahwa, kompetensi kompetensi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Alim, dkk (2007) juga membuktikan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, dimana salah satu indikasi kualitas audit yang baik adalah jika kecurangan yang ada dalam audit tersebut dapat dideteksi.

Berdasar uraian diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti apakah auditor yang berkerja di Inspektorat Kulon Progo telah bekerja secara profesional, dimana hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana kemampuan seorang auditor dapat mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan. Penelitian ini melibatkan responden auditor yang bekerja di Inspektorat

Daerah Kabupaten Kulon Progo, oleh karena itu peneliti mengangkat sebuah judul penelitian “PENGARUH PENGALAMAN, INDEPENDENSI, KOMPETENSI DAN SKEPTISISME PROFESIONAL TERHADAP KEMAMPUAN AUDITOR DALAM MENDETEKSI KECURANGAN (*FRAUD*) PADA LAPORAN KEUANGAN Studi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang peneliti kemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan?
2. Apakah independensi berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan?
3. Apakah kompetensi berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan?
4. Apakah skeptisisme profesional berpengaruh pada kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan?

C. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini tidak meneliti semua faktor

yang dapat mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Peneliti mengambil empat faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) yaitu pengalaman, independensi, kompetensi dan skeptisisme profesional.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah pengalaman mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan
2. Untuk mengetahui apakah independensi mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan
4. Untuk mengetahui apakah skeptisisme profesional mempunyai pengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan peneliti khususnya tentang pengaruh pengalaman, independensi, kompetensi dan skeptisisme profesional terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan pada instansi pemerintahan khususnya pemerintahan daerah.

2. Bagi Para Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai penerapan pengalaman, independensi, kompetensi dan skeptisisme profesional auditor

3. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah tentang seberapa jauh peranan auditor dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) pada laporan keuangan.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tinjauan dan teori-teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan skripsi dan literature review yang berhubungan dengan penelitian, yang membahas tentang internal audit, teori kecurangan, faktor-faktor penyebab terjadinya kecurangan, cara mendeteksi kecurangan, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta hipotesis pemikiran.

BAB III : METODELOGI PENELITIAN

Berisi uraian tentang lokasi penelitian, populasi, sampel penelitian, metode sampling yang dipakai, variabel penelitian, metode pengumpulan data yang mana menggunakan kuisioner penelitian yang diadopsi dari penelitian sebelumnya.

BAB IV : ANALISIS DATA

Merupakan hasil dari penelitian yang menguraikan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Memuat kesimpulan penelitian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, dan saran yang diperlukan untuk pihak yang berkepentingan.